

Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan

Gede Wirata¹, Tri Hayatining Pamungkas², Sri Sulandari³, Putu Deva Pradnyana Mardiana Putera⁴, Cokorda Putra Indrayana⁵

^{1, 3, 4, 5}Program Studi Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali

²Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali

Penulis korespondensi : Tri Hayatining Pamungkas

E-mail : tri.hayatining@unr.ac.id

Diterima: 12 November 2025| Direvisi: 26 November 2025| Disetujui: 18 Desember 2025

Abstrak

Kewarganegaraan berbasis administrasi dan perlindungan sosial merupakan landasan perlindungan dasar bagi warga negara. Namun, kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat seringkali menjadi hambatan dalam pengurusan dokumen dan akses ke jaminan sosial. Coconutdevotion bertujuan untuk meningkatkan literasi administrasi kewarganegaraan dan jaminan sosial bagi warga Banjar Gemeh, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar melalui sosialisasi kepada warga dan pengawasan langsung. Peserta terdiri dari 62 orang, termasuk warga desa, pejabat desa, dan perwakilan organisasi Sekolah Perempuan Bali Sruti. Mitra memainkan peran penting dalam menggerakkan peserta, menyediakan tempat kegiatan, dan menjadi saluran advokasi melalui pos pengaduan anak-anak Sruti untuk kasus kekerasan dan masalah hukum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan bantuan administratif. Hasil menunjukkan bahwa 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang fungsi administrasi kewarganegaraan dan manfaat jaminan sosial. Selain itu, 17 peserta secara langsung berkonsultasi mengenai pengisian dokumen KTP, KK, dan akta kelahiran. Hal ini juga meningkatkan akses warga terhadap layanan perlindungan hukum melalui pengenalan pos pengaduan anak-anak Sruti, yang merespons 4 laporan awal mengenai hambatan administratif dan kerentanan hukum. Catatan tersebut menegaskan kembali bahwa sosialisasi sistematis dan pemantauan berbasis komunitas merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran, memfasilitasi pemenuhan dokumen, dan meningkatkan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan jaminan sosial. Kolaborasi antara universitas, pemerintah desa, dan KOEM merupakan langkah alami dalam memperkuat ekosistem layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Masyarakat; Pendampingan; Pos Pengaduan.

Abstract

Administrative-based citizenship and social protection are the foundation of a citizen's basic protection. However, lack of knowledge among the community has often become a barrier to document fulfillment and access to social security. Coconutdevotion aims to increase the literacy of citizenship administration and social security for the citizen of Banjar Gemeh, Dauh puri kangin Village, Denpasar by socializing citizens and doing direct supervising. The participants were 62 persons of villagers, the village officials, and the representative of Bali's Women School's organization Sruti. Partner played a vital role in mobilizing the participants, providing the place for activity, and the advocate's channel through Sruti children's complain post for violence and legal problem cases. The execution method was done through delivering material, interactive discussion, and administrative assisting. The results showed that 80% of participants had an improvement in grasping citizenship administration functions and social security benefits knowledge. Additionally, 17 participants had directly consulted document's fulfillment of KTP, KK, and birth certificate. It also heightens citizen access to legal protection service with Sruti's children complaisant post introduction which responded 4 early reports regarding administrative barriers and legal vulnerabilities. The notes reaffirm that systematic socialization and community-based monitoring

are effective tools in heightening awareness, facilitating document fulfilment, and increasing access to legal protection and social security service. University-village government-KOEM collaboration is the natural link in strengthening an inclusive and sustainable social services ecosystem.

Keywords: Population Administration; Social Security; Community Empowerment; Assistance; Complaint Desk.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan komponen fundamental dalam tata kelola pemerintahan karena memastikan pengakuan identitas, kepastian hukum, dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara (Moodoeto et al., 2025; Zulfikar et al., 2022). Sebagai layanan publik vital, pemerintah dituntut menyelenggarakan pelayanan administrasi yang akuntabel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arikinanti et al., 2025; Hanyfa & Rustianingsih, 2024). Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan sebagai bukti identitas dan status hukum (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, 2013). Dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menyalurkan program jaminan sosial secara tepat sasaran (Ayuningtias et al., 2025).

Permasalahan administrasi kependudukan masih umum terjadi di berbagai daerah, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat hingga keterbatasan akses layanan administrasi (Hidayat et al., 2025; Nangka et al., 2024). Kondisi ini juga ditemukan di Banjar Gemeh, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar, di mana sebagian warga belum memiliki dokumen dasar seperti KTP, KK, atau akta kelahiran. Berdasarkan pendataan awal tim, sedikitnya 17 warga melaporkan kendala pengurusan dokumen administratif, baik karena hilang, belum diperbarui, maupun belum pernah didaftarkan sebelumnya. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan pendampingan untuk memastikan seluruh warga memiliki identitas hukum yang sah (Saefullah et al., 2023).

Ketidaklengkapan dokumen kependudukan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, bantuan pemerintah, serta perlindungan hukum. Secara teoritis, administrasi kependudukan merupakan instrumen governance yang menciptakan keteraturan sosial (Nguyen et al., 2024), sedangkan jaminan sosial berfungsi menekan risiko kerentanan ekonomi dan sosial (*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, 2004). Dalam konteks good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif (Eskelinen, 2021; Marhadila et al., 2024; Widanti, 2022).

Permasalahan administrasi kependudukan yang tidak tertib juga memiliki implikasi hukum. Warga tanpa dokumen resmi sering mengalami hambatan dalam mengakses bantuan hukum atau melaporkan kasus kekerasan dan pelanggaran hak, karena ketiadaan identitas mengurangi kekuatan bukti dan legitimasi pengaduan (Paradias & Soponyono, 2022; Rahmat et al., 2021). Hambatan administratif ini menempatkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, pada posisi yang semakin lemah dalam sistem perlindungan hukum (Rodliyah et al., 2021; Suryamizon, 2017). Dengan demikian, penataan administrasi kependudukan yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk memperkuat akses layanan sosial sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak hukum warga negara.

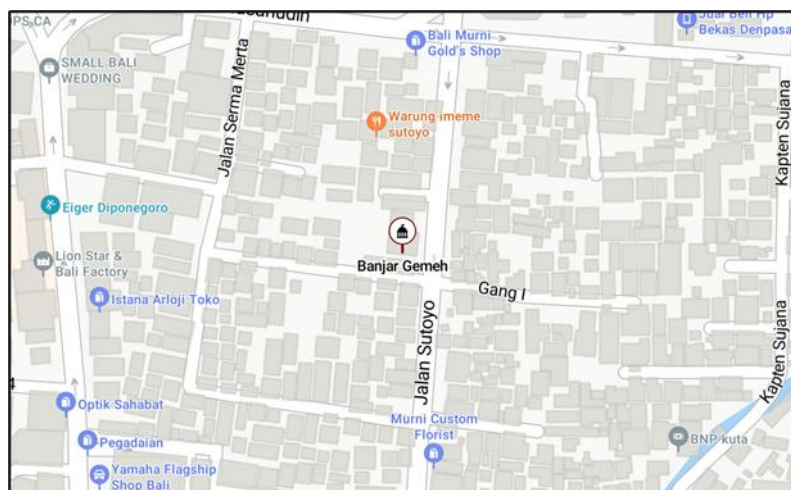
Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi dan pendampingan administrasi kependudukan di Banjar Gemeh menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman, merapikan dokumen kependudukan, serta memperluas akses warga terhadap layanan jaminan sosial dan perlindungan hukum. Kolaborasi antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat seperti Bali Sruti menjadi strategis dalam menciptakan ekosistem layanan administrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Banjar Gemeh menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam mengidentifikasi kebutuhan administratif, serta pendekatan penyuluhan dan pendampingan langsung untuk membantu warga menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan dan jaminan sosial. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman, memfasilitasi perbaikan dokumen kependudukan, serta memperluas akses warga terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Pendekatan PRA memungkinkan warga menyampaikan persoalan secara terbuka, sedangkan metode pendampingan langsung efektif untuk menyelesaikan kendala administratif yang bersifat personal.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 11 Juni 2023 bertempat di Balai Banjar Gemeh, Jl. Sutoyo No. 18, Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Bali. Lokasi ditampilkan pada peta Google Maps sebagai referensi visual untuk memastikan kejelasan area pelaksanaan kegiatan. Lokasi Banjar Gemeh ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Banjar Gemeh Dauh Puri Kangin
Sumber: Google Map, (2025)

Peserta dan Mitra Pelaksana

Peserta kegiatan berjumlah 62 orang yang terdiri dari warga Banjar Gemeh, perangkat desa, serta perwakilan Sekolah Perempuan dan Bali Sruti. Mitra berperan dalam mobilisasi peserta, penyediaan fasilitas, serta integrasi layanan advokasi melalui Pos Pengaduan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Identifikasi Permasalahan (PRA)

Tim melakukan pemetaan awal terhadap kendala administrasi kependudukan melalui:

- wawancara singkat,
- pemetaan masalah bersama warga,
- diskusi dengan perangkat desa.

Tahap ini menemukan 17 kasus terkait dokumen yang hilang, belum diperbarui, atau belum pernah didaftarkan.

b. Penyusunan Materi dan Perangkat Kegiatan

Tim menyusun modul sosialisasi yang mencakup:

- alur pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran,
- prosedur jaminan sosial (BPJS/JKN),
- alur pengaduan melalui Sekolah Perempuan.

c. Sosialisasi (Ceramah Interaktif & FGD)

Sesi sosialisasi dilaksanakan melalui:

- ceramah interaktif menggunakan media slide,
- diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali kendala warga,
- studi kasus terkait pengurusan dokumen kependudukan.

d. Simulasi Pengisian Formulir

Peserta dibimbing untuk:

- mengisi formulir permohonan KTP, KK, dan akta,
- memahami dokumen pendukung yang diperlukan,
- menyiapkan berkas untuk pengajuan ke Disdukcapil.

e. Pendampingan Individu (One-on-One Assistance)

Tahap ini dilakukan untuk warga yang memiliki kendala khusus. Tim mendampingi peserta per individu untuk:

- verifikasi data,
- pengecekan kesalahan elemen identitas,
- konsultasi dokumen hukum dan jaminan sosial.

Instrumen Evaluasi

Evaluasi dilakukan menggunakan tiga instrumen:

1. Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terkait administrasi kependudukan dan jaminan sosial.
2. Kuesioner kepuasan peserta untuk menilai efektivitas metode penyuluhan, pendampingan, materi, dan fasilitator.
3. Lembar observasi untuk mencatat keaktifan peserta, kesulitan pengisian formulir, serta kualitas interaksi selama pendampingan.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman pada 80% peserta dan penyelesaian konsultasi administratif pada 17 warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Banjar Gemeh diikuti oleh 62 peserta, terdiri atas warga, perangkat desa, serta perwakilan Sekolah Perempuan dan Bali Sruiti. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi utama, yaitu sosialisasi administrasi kependudukan dan jaminan sosial, serta pengenalan Pos Pengaduan dan layanan perlindungan hukum.

1. Hasil Pre–Post Test dan Tingkat Partisipasi Warga

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pre–post test untuk mengukur peningkatan literasi administrasi kependudukan. Hasilnya menunjukkan:

- Rata-rata nilai pre-test: 52,3
- Rata-rata nilai post-test: 81,6
- Terjadi peningkatan pemahaman sebesar 56%

Sebanyak 49 dari 62 peserta (79%) mengikuti post-test secara penuh, menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Tingginya keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab selaras dengan *Teori Partisipasi* (Chambers, 1997) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan berbasis komunitas.

2. Konsultasi Administratif dan Jenis Dokumen yang Dibantu

Selama sesi pendampingan individu, tercatat 17 warga melakukan konsultasi langsung terkait dokumen kependudukan. Jenis layanan yang paling banyak ditanyakan meliputi:

- Perbaikan data KTP (7 kasus)
- Pembuatan Kartu Keluarga (KK) (5 kasus)
- Permohonan Akta Kelahiran (3 kasus)
- Konsultasi terkait BPJS/JKN (2 kasus)

Bentuk bantuan yang diberikan adalah verifikasi data, pengecekan kelengkapan berkas dan formulir, serta penjelasan alur pelayanan di Disdukcapil. Data ini sejalan dengan konsep *literasi administrasi*, bahwa pemahaman warga meningkat ketika proses belajar disertai praktik langsung dan asistensi personal.

3. Hasil Sosialisasi dan Dampak Pemahaman Warga

Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman warga mengenai fungsi dokumen kependudukan dan pentingnya jaminan sosial. Banyak warga sebelumnya belum mengetahui konsekuensi hukum dari tidak memiliki dokumen lengkap, terutama terkait keterbatasan akses bantuan sosial dan layanan publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pemberdayaan terjadi ketika warga memahami hak-haknya serta sistem yang memengaruhi kehidupan mereka (Banks et al., 2020).

4. Data Kualitatif: Testimoni Warga dan Hambatan yang Ditemukan

a. Testimoni Warga

Beberapa kutipan langsung dari peserta menunjukkan dampak program:

- “*Saya baru tahu kalau kesalahan kecil di KTP bisa menghambat pencairan bantuan sosial.*” (Warga, 34 tahun)
- “*Pendampingan tadi membantu saya mengisi formulir KK yang selama ini saya bingung.*” (Warga, 41 tahun)
- “*Saya merasa lebih percaya diri untuk mengurus BPJS setelah dijelaskan langkah-langkahnya.*” (Warga, 29 tahun)

Testimoni ini menunjukkan peningkatan literasi dan keberanian warga untuk mengakses layanan administrasi sesuai teori pemberdayaan komunitas.

b. Hambatan Selama Kegiatan

Beberapa tantangan yang ditemukan antara lain:

- Rendahnya kesiapan dokumen awal sehingga beberapa peserta belum dapat menyelesaikan berkas pada hari kegiatan.
- Keterbatasan jaringan internet saat mengakses sistem Disdukcapil online.
- Minimnya pemahaman mengenai persyaratan legal formal, sehingga peserta membutuhkan pendampingan lebih detail.

Hambatan ini menambah catatan penting bahwa pemberdayaan administrasi tidak dapat dilakukan satu kali, tetapi memerlukan proses pendampingan berkelanjutan.

5. Integrasi Pos Pengaduan dan Akses Perlindungan Hukum

Sesi kedua memperkenalkan mekanisme Pos Pengaduan dan peran Sekolah Perempuan dalam advokasi kasus kekerasan atau hambatan administratif. Tercatat 4 laporan awal yang ditindaklanjuti oleh Bali Sruti, terutama terkait:

- hambatan pengurusan identitas hukum,
- kebutuhan rujukan bantuan hukum,
- kekerasan domestik yang memerlukan pendampingan lanjutan.

Integrasi layanan ini memperkuat prinsip *governance* bahwa administrasi kependudukan dan perlindungan hukum adalah dua aspek yang saling terkait.

6. Pembahasan: Keterkaitan Temuan dengan Teori

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi aktif warga dalam FGD dan sesi konsultasi memperkuat efektivitas penyuluhan karena warga terlibat sebagai subjek perubahan, bukan sekadar penerima informasi. Hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan bahwa partisipasi bermakna meningkatkan kapasitas warga dalam memahami isu publik dan mendorong perubahan perilaku (Nabatchi & Leighninger, 2023). Selain itu, peningkatan skor pre-post test menegaskan bahwa literasi administrasi dapat dibangun melalui kombinasi metode ceramah, praktik simulasi, dan pendampingan langsung. Pendekatan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik meningkatkan akurasi dan kepercayaan warga dalam mengelola dokumen administratif (Gao et al., 2023). Lebih jauh, peningkatan pemahaman warga tentang risiko hukum dan pentingnya identitas hukum mencerminkan proses pemberdayaan, di mana individu memperoleh kontrol atas informasi dan sumber daya yang memengaruhi kehidupannya. Hal ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa akses terhadap informasi dan instrumen legal merupakan faktor utama peningkatan kapasitas pengambilan keputusan dalam konteks komunitas berisiko (Larson et al., 2024).

7. Keberlanjutan Program dan Komitmen Mitra

Untuk memastikan keberlanjutan, beberapa tindak lanjut yang telah disepakati adalah:

1. Pembuatan jadwal pendampingan lanjutan bagi warga yang dokumennya belum lengkap.
2. Komitmen Sekolah Perempuan/Bali Sruti untuk membuka Pos Pengaduan mobile setiap bulan.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengintegrasikan layanan administrasi dalam kegiatan rutin banjar.
4. Monitoring tiga bulan oleh tim PKM untuk mengevaluasi penyelesaian dokumen dan perubahan perilaku administratif warga.

Upaya keberlanjutan ini memastikan bahwa kegiatan tidak berhenti pada sosialisasi awal, tetapi terus memberikan dampak jangka panjang sesuai prinsip *community empowerment*. Kegiatan sosialisasi ini ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil sosialisasi administrasi kependudukan dan jaminan sosial Banjar Gemeh

No	Kegiatan	Pelaksana	Luaran
1	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Dr. I Made Sumada	Peningkatan pemahaman warga

2	Diskusi Interaktif	Tim FISHUM UNR	Identifikasi kendala dan solusi
3	Pengenalan Pos Pengaduan	Sri Sulandari	Informasi layanan Sekolah Perempuan
4	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Mahasiswa UNR	Cek tensi, gula darah, dan pemberian vitamin

Sumber: Hasil Sosialisasi, 2023

Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dan jaminan sosial di Banjar Gemeh, Desa Dauh Puri Kangin ditampilkan pada Gambar 2 sampai dengan Gambar 4.



Gambar 2. Pemaparan Materi Tentang Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial

Sumber: Dokumentasi Bali Sruti & UNR, (2023)



Gambar 3. Foto bersama peserta kegiatan sosialisasi di Banjar Gemeh
Sumber: Dokumentasi Bali Sruti & UNR, (2023)



Gambar 4. Kegiatan Cek Kesehatan
Sumber: Dokumentasi Bali Sruti & UNR, (2023)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan PKM di Banjar Gemeh berhasil meningkatkan literasi administrasi kependudukan secara signifikan. Nilai pre-post test mengalami kenaikan 56%, dan 79% peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pendampingan langsung terbukti paling efektif, terlihat dari terselesaikannya 17 kasus dokumen kependudukan serta munculnya 4 laporan awal melalui Pos Pengaduan Sekolah Perempuan. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi sosialisasi, simulasi formulir, dan konsultasi individu dapat mempercepat pemahaman warga dan penyelesaian kendala administratif.

Dua lesson learned utama diperoleh dari kegiatan ini: (1) pendampingan personal sangat diperlukan karena sebagian besar persoalan warga bersifat individual dan teknis; dan (2) sinergi universitas, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat seperti Bali Sruti merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas akses layanan administratif dan perlindungan hukum.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan program:

1. Mengaktifkan posko layanan administrasi di tingkat banjar secara rutin untuk mempermudah warga melakukan verifikasi data dan konsultasi dokumen.
2. Memberikan pelatihan lanjutan bagi kader perempuan, sehingga mereka dapat menjadi pendamping lokal yang memahami prosedur administrasi dan jaminan sosial.
3. Mereplikasi model pendampingan ini di banjar lain, terutama pada wilayah dengan tingkat ketidaklengkapan dokumen yang cukup tinggi.
4. Melakukan monitoring berkala pasca-kegiatan guna memastikan proses penyelesaian dokumen benar-benar tuntas.

5. Memperkuat fungsi Pos Pengaduan sebagai pusat rujukan bagi warga yang menghadapi hambatan administratif dan hukum, dengan alur layanan yang lebih sederhana dan mudah diakses.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Kegiatan ini masih terbatas pada satu banjar yang ada di Kota Denpasar dan belum mencakup analisis kuantitatif mendalam. Penelitian lanjutan dapat dilakukan di desa lain untuk melihat seberapa tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib Administrasi Kependudukan dan pentingnya Jaminan Sosial bagi kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Sosialisasi mengenai pos pengaduan juga harus lebih sering dilakukan agar kekerasan semakin menurun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin, serta Bali Sruti atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikinanti, Z., Jumhana, E., Sihite, D. P., Gurusinga, A. B., & Yuliasuti. (2025). Analisis Pentingnya Suatu Sistem terhadap Jaminan Sosial bagi Para Tenaga Kerja. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 227–235. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1765>
- Ayuningtias, P. I., Putriana, M., Rosalina, I. F., Sari, W. P., & Fatimah, A. N. (2025). Strategi Komunikasi Disdukcapil Kota Bogor dalam Meningkatkan Kesadaran Publik mengenai Administrasi Kependudukan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(3), 7606–7618.
- Banks, N., Lombard, M., & Mitlin, D. (2020). Urban informality as a site of critical analysis. *The Journal of Development Studies*, 56(2), 223–238. <https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1577384>
- Eskelinen, T. (2021). Interpreting the Sustainable Development Goals through the Perspectives of Utopia and Governance. *Forum for Development Studies*, 48(2), 179–197.
- Gao, Y., Wang, J., & Chen, L. (2023). Enhancing administrative literacy through experiential learning: Evidence from community-based training. *Public Administration Review*, 83(2), 345–358. <https://doi.org/10.1111/puar.13578>
- Hanyfa, M. R., & Rustianingsih, E. (2024). Collaborative Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon. *Journal Publicuho*, 7(3), 1471–1488. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507>
- Hidayat, R., Mayasari, R. E., Rahman, I., & Basrawi. (2025). Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Urgensi Administrasi Kependudukan dalam Perlindungan Hak Warga Desa. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(3), 1456–1464.
- Larson, G., Peters, D., & Rowland, M. (2024). Empowerment through legal awareness: Understanding decision-making capacity in vulnerable communities. *Journal of Community Development*, 59(1), 22–39. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsad067>
- Marhadila, F., Firdaus, F. P., Kadilla, I. D. R., Apriliani, P. F., & Khoiriawati, N. (2024). Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 811–823.

- Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas Perlindungan Hak Identitas Anak melalui Digitalisasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bonebolango. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 537–548.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2023). Rethinking public participation: Community engagement and democratic capacity. *Journal of Public Deliberation*, 19(1), 1–18. <https://doi.org/10.16997/jdd.985>
- Nangka, P. T., Kairupan, S. B., & Pangkey, I. (2024). Standar Pelayanan Publik dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Tomohon. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 629–642.
- Nguyen, N. T., Nico, G., Nguyen, T. H., Bladon, A., & Ducros, A. (2024). Connecting Social Protection, Labor Market Interventions and Fisheries Management in Viet Nam. In *Social Protection & Jobs: Policy & Technical Note* (Vol. 1, Issue 41).
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment*, 4(2), 156–163.
- Rodliyah, Putro, W. D., & Cahyowati, R. (2021). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 3(1), 22–30.
- Saefullah, A., Fahri, F., & Hidayatullah, S. (2023). Empowering Ciung Wanara Tourism Site Food Stall Owners with Digital Marketing Expertise and Business Licencing. *SPEKTA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Teknologi Dan Aplikasi)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.12928/spekta.v4i2.8036>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–128. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. (2013).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2004).
- Widanti, N. P. T. (2022). *Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*. Jurnal Abdimas Peradaban.
- Zulfikar, Rozaili, & Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*. CV. Eureka Media Aksara.